

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN  
KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN  
MORALITAS INDIVIDU TERHADAP *ACCOUNTING*  
*FRAUD TENDENCY* PADA PENGELOLA  
KEUANGAN DESA**

(Studi Empiris Di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

**SKRIPSI**

Oleh  
**FRANSISCA DWI PALUPINGSIH**  
NIM: G02218008



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN

Saya, Fransisca Dwi Palupiningsih, G02218008, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 09 Agustus 2022



Fransisca Dwi Palupiningsih  
NIM. G02218008

**Surabaya, 09 Agustus 2022**

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing,



Nufaisa, M.Ak  
NIP. 198907312019032014

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN  
KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN  
MORALITAS INDIVIDU TERHADAP *ACCOUNTING  
FRAUD TENDENCY* PADA PENGELOLA  
KEUANGAN DESA  
(Studi Empiris Di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)**

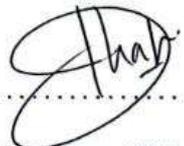
Oleh  
Fransisca Dwi Palupiningsih  
NIM: G02218008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal  
09 Agustus 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Nufaisa, M.Ak  
NIP. 198907312019032014  
(Penguji 1)
2. Dwi Koerniawati, S.E., M.A., AK., CA  
NIP. 198507122019032010  
(Penguji 2)
3. Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A, CSRS., CSRA  
NIP. 199007292019032022  
(Penguji 3)
4. Ashari Lintang Yudhanti  
NIP. 199411082019032021  
(Penguji 4)

**Tanda Tangan:**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 09 Agustus 2022  
Dekan  
  
Dr. Sirojul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 197005142000031001 



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fransisca Dwi Palupiningsih  
NIM : G02218008  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi  
E-mail address : fransisca1848@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI,  
KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP  
ACCOUNTING FRAUD TENDENCY PADA PENGELOLA KEUANGAN DESA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2023

Penulis

(Fransisca Dwi Palupiningsih)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah bentuk tindakan penyimpangan yang sering terjadi dan telah mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Kecondongan atau keinginan untuk melakukan kecurangan dengan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi baik dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap *accounting fraud tendency* pada Pengelola Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 98 responden dari 20 kantor desa di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software IBM SPSS 26*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap *accounting fraud tendency*.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pihak pengelola keuangan desa agar dapat mempertahankan pengendalian internal yang efektif, taat terhadap aturan akuntansi, dan moralitas individunya. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa memenuhi penelitian tentang *accounting fraud tendency* dengan menentukan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dengan mengembangkan teori selain *fraud pentagon*.

Kata kunci: pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, *accounting fraud tendency*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRACT

Accounting fraud tendency is a form of irregularity that often occurs and has received special attention from various parties. The inclination or desire to commit fraud with unlawful acts and harm other parties with the aim of obtaining personal gain, whether carried out by people from within or outside the organization.

This study aims to empirically examines the effect of internal control, compensation suitability, compliance with accounting rules, and individual morality on accounting fraud tendency in village financial managers. This type of research is quantitative research. The research sample was 98 respondents from 20 village offices in Tarik District, Sidoarjo Regency. Sample determination using purposive sampling method. Data analysis technique using multiple linear regression analysis technique with the help of IBM SPSS 26 software.

The results showed that internal control, obedience to accounting rules, and individual morality had a negative and significant effect on accounting fraud tendency, while compensation suitability had a positive effect on accounting fraud tendency.

This study provides recommendations to the village financial manager in order to maintain effective internal control, obey accounting rules, and individual morality. For further research, it is hoped that it can fulfill research on accounting fraud tendency by determining other variables that influence it by developing theories other than pentagon fraud.

Key words: internal control, compensation suitability, compliance with accounting rules, individual morality, accounting fraud tendency

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>DECLARATION</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1. <i>Fraud Pentagon Theory</i> .....	14
2.1.2. <i>Agency Theory</i> .....	19
2.1.3. Teori Atribusi.....	22
2.1.4. Akuntansi Sektor Publik .....	24
2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	26
2.3. Pengembangan Hipotesis .....	31
2.3.1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap <i>Accounting Fraud Tendency</i> ....	31
2.3.2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap <i>Accounting Fraud Tendency</i>	33

2.3.3.	Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap <i>Accounting Fraud Tendency</i>	34
2.3.4.	Pengaruh Moralitas Individu terhadap <i>Accounting Fraud Tendency</i> .....	36
2.4.	Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	38
3.2.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
3.3.1.	Populasi.....	39
3.3.2.	Sampel.....	39
3.4.	Variabel Penelitian .....	40
3.5.	Definisi Operasional.....	40
3.5.1.	<i>Accounting Fraud Tendency</i> .....	40
3.5.2.	Pengendalian Internal.....	41
3.5.3.	Kesesuaian Kompensasi.....	42
3.5.4.	Ketaatan Aturan Akuntansi.....	42
3.5.5.	Moralitas Individu.....	43
3.6.	Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1.	Statistik Deskriptif .....	44
3.6.2.	Uji Kualitas Data.....	45
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.	Data dan Sumber Data.....	48
3.7.1.	Jenis Data .....	48
3.7.2.	Sumber Data.....	49
3.8.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.8.	Pengujian Hipotesis.....	49
3.8.1.	Teknik Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
3.8.2.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	50
3.8.3.	Uji Statistik t (Uji Parsial).....	51

3.8.4. Uji Statistik F .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	64
4.1.1. Lokasi Penelitian.....	64
4.1.2. Karakteristik Responden.....	65
4.2. Analisis Data .....	69
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	69
4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data .....	70
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	75
4.2.4. Hasil Uji Hipotesis.....	80
4.3. Pembahasan.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

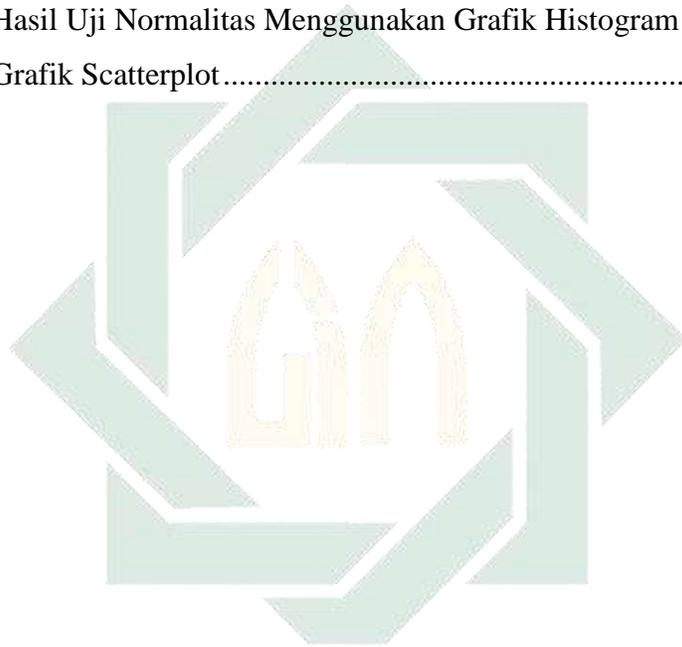
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Data .....	48
Tabel 3. 2 Operasional Variabel .....	43
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian .....	65
Tabel 4. 2 Daftar Pemerintah Desa di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo .....	65
Tabel 4. 3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur .....	66
Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	67
Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan .....	68
Tabel 4. 7 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	68
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	69
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal (X1) .....	71
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Kesesuaian Kompensasi (X2) .....	71
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Ketaatan Aturan Akuntansi (X3) .....	72
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Moralitas Individu (X4) .....	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Accounting Fraud Tendency (Y) .....	74
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	75
Tabel 4. 15 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov (K-S) .....	77
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas .....	78
Tabel 4. 17 Hasil Uji Glejser .....	80
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F .....	81
Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t .....	82
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	85

## DAFTAR GAMBAR

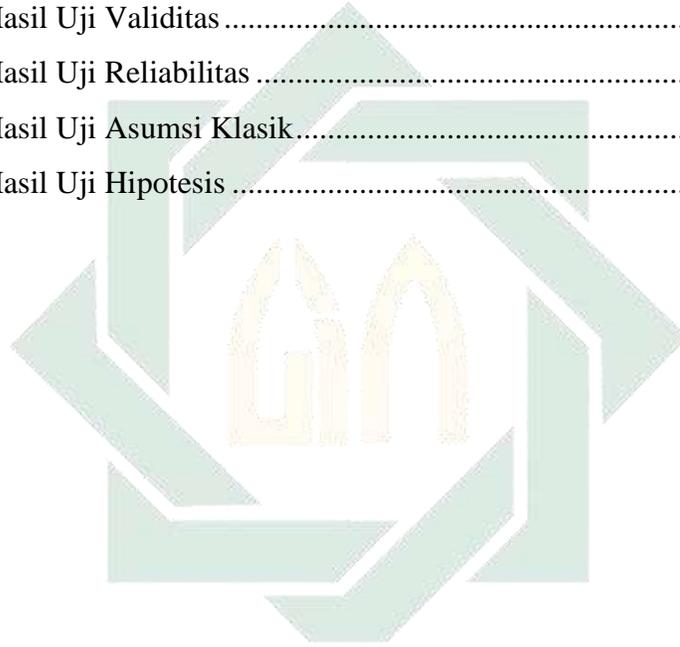
Gambar 2. 1 <i>Fraud Pentagon Theory</i> .....	15
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot.....	76
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram.....	77
Gambar 4. 3 Grafik Scatterplot.....	79



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	105
Lampiran 2 Kuisisioner .....	107
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	112
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas .....	127
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas .....	139
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	143
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis .....	147



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan banyaknya kesempatan membuka usaha baru dapat memungkinkan terjadinya kecurangan akuntansi pada suatu instansi maupun perusahaan. Kecurangan akuntansi atau penyebutan audit disebut sebagai *fraud* belakangan ini telah mendapatkan banyak pemberitaan dari media karena sering terjadi pada era globalisasi. Bentuk kecurangan (*fraud*) di Indonesia sendiri dapat dilihat dari adanya perbuatan dan pembuatan aturan yang secara disengaja untuk melakukan penipuan dan manipulasi dengan menghilangkan atau menyembunyikan informasi serta dapat merugikan pihak lain. Indonesia termasuk negara dengan banyak kasus kecurangan akuntansi (*fraud*). Isu penipuan, ancaman, dan berbagai macam praktik kecurangan yang telah beredar menciptakan kekacauan selama ini. Berbagai upaya dan metode pencegahan telah dilakukan, tetapi kecurangan masih menjadi perhatian terbesar dalam menjalankan bisnis. Kasus *accounting fraud tendency* yang terjadi secara berulang-ulang ini menjadi awal munculnya tindak pidana korupsi yang ditandai dengan adanya tindakan secara tidak benar oleh pejabat ataupun munculnya petugas dengan melakukan pelanggaran atas hak dan kewajiban orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.

*Transparency International Indonesia*, merilis *Corruption Perception Index* (2021) bahwa semua negara tingkat korupsi mengalami stagnasi dengan taraf 86% tidak ada kemajuan dalam 10 tahun terakhir. Riset mengenai persepsi korupsi dengan

parameter nilai semakin tinggi nilai semakin bersih menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dengan nilai 38 yang berarti naik 1 poin dari tahun 2020 lalu dengan nilai 37. Dalam persepsi korupsi di Asia Tenggara, Indonesia mengambil posisi kelima dengan tingkat negara paling bersih dari korupsi. Pada dasarnya tindakan pelaku kecurangan (*fraud*) akuntansi disebabkan oleh faktor eksternal (luar) dan faktor internal (dalam) individu sendiri.

*Accounting Fraud Tendency* atau Kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah bentuk dari tindakan penyimpangan yang sering terjadi dan telah mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Kecenderungan berarti “kecondongan atau keinginan” untuk melakukan kecurangan. Kecurangan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi baik yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Kecurangan terbagi menjadi tiga macam yaitu, 1) Penyimpangan atas aset yaitu perbuatan curang yang dilakukan dengan tindakan pencurian aktiva, 2) Pengungkapan laporan keuangan yang dipalsukan dengan sengaja untuk menipu pihak-pihak pemakai laporan keuangan tersebut, 3) Penyimpangan kekuasaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Tuannakotta, 2018). Tindakan penyimpangan dapat terjadi di mana saja baik di instansi publik maupun perusahaan swasta dengan berbagai bentuk kejahatan. Menurut Thoyibatun bentuk *accounting fraud tendency* terbagi menjadi beberapa macam, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, penyalahgunaan aset, dan korupsi adalah contoh bentuk *accounting fraud tendency* yang sering terjadi baik di sektor pemerintah ataupun swasta (Thoyibatun, 2012).

Sulastrri menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi (*fraud*) di instansi pemerintahan lebih banyak terjadi karena memiliki struktur dan sistem birokrasi yang cukup kompleks, kontrol yang tidak efektif, integritas yang rendah, serta tekanan dari lingkungan kerja yang tinggi (Sulastrri & Simanjuntak, 2014). Dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi diharapkan *accounting fraud tendency* ini dapat berkurang dan penyajian laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak salah saji material, tidak terdapat penyalahgunaan aset ataupun kasus korupsi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah desa diberikan wewenang menyelenggarakan pemerintahannya serta memberikan kesempatan melakukan pembangunan desa mulai dari pemerataan infrastruktur desa dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bergulir sejak tahun 2015 hingga saat ini, penyaluran dana desa mencapai Rp. 323 triliun dan untuk tahun 2021 sudah dianggarkan sebesar Rp 72 triliun. Dana yang disalurkan untuk kebutuhan 74.961 desa di seluruh Indonesia. Dana tersebut ternyata banyak mengalami korupsi dalam perkembangannya. Kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga saat ini. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa dana yang paling rentan dikorupsi adalah anggaran dana desa yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan wilayah desa di Indonesia (cnnindonesia.com).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis laporan penanganan kasus korupsi sebanyak 209 kasus di semester awal tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 169 kasus dengan kerugian yang ditanggung

negara mencapai Rp 26,83 triliun. Pada awal tahun 2021 (Januari-Juni), lembaga dengan kasus korupsi terbesar adalah pemerintah desa diikuti pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan masing-masing 62, 60 dan 17 kasus. Menurut ICW, tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi paling banyak di awal tahun 2021 adalah aparat desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Malang Corruption Watch* (MCW) menyebutkan bahwa terdapat 14 kasus penangkapan kepala daerah di Jawa Timur oleh KPK dalam kurun waktu 2017-2021. Hal tersebut membuat Jawa Timur menjadi provinsi dengan kepala daerah terbanyak yang ditangkap KPK. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga masih banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur yang salah satunya disebabkan karena kegiatan penyelewengan pada anggaran dana desa (cnnindonesia.com).

Beberapa daerah di Jawa Timur juga terkena kasus korupsi salah satunya adalah Sidoarjo. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), administrasi Pemerintah Sidoarjo dalam tahun 2020 dan 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun hasil audit adalah WTP beberapa waktu setelahnya membuktikan bahwa adanya tindak pidana korupsi terhadap kepala daerah Sidoarjo. Bupati Sidoarjo dua periode (periode 2010-2015 dan 2016-2021) tersebut telah melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP (cnnindonesia.com).

Tindakan korupsi juga terjadi di pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa oknum kepala desa ditemukan menyalahgunakan anggaran dana desa dan kekuasaan jabatan. Pada 17 Januari 2022, Kepala Desa dan dua Perangkat Desa

Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) atas dugaan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo menjelaskan ketiga tersangka memiliki peran berbeda-beda. Kepala desa berperan sebagai otak dalam Pungli PTSL, bendahara desa berperan menyimpan uang hasil Pungli di rekening pribadinya sebesar Rp 81 juta, dan perangkat lain berperan sebagai penarik uang Pungli ke para pemohon PTSL. Ketiganya dijerat pasal 12e dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2014 terancam maksimal 4 tahun penjara (republikjatim.com).

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyorot “Zero LPJ” oleh mantan kepala desa dan dua Pejabat Sementara (PJs) Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Dugaan korupsi dan penggelapan dana desa yang dibalut dengan fenomena nepotisme (KKN) melibatkan oknum bendahara desa yang tak lain adalah keponakan ketua BPD Wonokasian sekaligus kerabat mantan kepala desa sebelumnya. Kasus korupsi terjadi pada tahun 2019 pada dua proyek jembatan di Dusun Dugo dan Dusun Kasian dengan masing-masing proyek senilai Rp150 juta. Selain itu diduga terdapat masalah dalam penyaluran BLT dari Anggaran Dana Desa (ADD). Mantan Kepala Desa Ngaban (IN), Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo resmi menjadi tersangka pada oktober 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp174.638.235. Tersangka diancam hukuman penjara pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari

kasus korupsi tersebut menunjukkan tidak sejalan tujuan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya anggaran dana desa (jatim.tribunnews.com).

Banyak bentuk kasus korupsi di desa yang sering terjadi seperti penyalahgunaan wewenang sampai dengan penggelapan anggaran dana desa. Banyaknya laporan penggelapan dana desa yang masuk sehingga KPK mengoordinasikan dengan Kemendes PDTT bahwa terungkapnya dugaan korupsi dana desa disebabkan lemah secara administrasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa dan 14 temuan yang masuk dalam empat aspek yaitu pada aspek regulasi dan kelembagaan misalnya persoalan formula pembagian dana desa yang berubah, aspek tata laksana misalnya persoalan pertanggungjawaban laporan yang dibuat pemerintah desa masih belum melewati standar yang ditetapkan sehingga sering terjadi tindakan manipulasi, aspek pengawasan misalnya persoalan tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa yang masih rendah, dan aspek sumber daya manusia misalnya persoalan tenaga pendamping yang berpotensi melakukan kecurangan karena lemahnya aparat desa. KPK berharap adanya dana desa tersebut mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakatnya.

Tindak pidana korupsi oleh pemerintah desa yang sudah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi (*fraud*) dapat terjadi di mana saja baik pada sektor swasta maupun instansi pemerintah termasuk pemerintah desa. Mustikasari menyatakan bahwa tidak hanya seseorang dengan jabatan yang tinggi

sebagai pelaku kecurangan, orang-orang dibawahnya juga bisa melakukan kecurangan dan bahkan banyak terjadi di pemerintah daerah (Mustikasari, 2013). Dampak dari kecurangan (*fraud*) yang ditimbulkan ini sangat merugikan negara, karena terjadinya *accounting fraud tendency* tersebut pemerintah desa harus melakukan pencegahan agar dapat diminimalisir.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan *accounting fraud tendency*. Thoyibatun menyatakan bahwa *accounting fraud tendency* terjadi karena pengaruh faktor pengendalian internal, sistem kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi (Thoyibatun, 2012). Fernanda menyatakan tindakan pencegahan *accounting fraud tendency* dilakukan dengan faktor peningkatan pengendalian internal, moralitas individu yang tinggi, dan nilai etika yang baik (Fernandhytia & Muslichah, 2020). I Wayan melakukan penelitian terkait pencegahan *accounting fraud tendency* di Pemerintah Desa dengan pengaruh variabel kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi desa, serta profesionalisme jabatan (Pandita et al., 2020).

Akhirnya penelitian *accounting fraud tendency* ini memilih pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu sebagai variabel independen. Pemilihan variabel-variabel tersebut berdasarkan teori *fraud pentagon* yang banyak dipakai dalam menginvestigasi kasus-kasus *fraud tendency*. Teori *Fraud Pentagon* memiliki lima sifat yang diyakini menjadi hipotesis bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *competence* (kemampuan), dan

arrogance (kesombongan). Seseorang melakukan tindakan kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya, kemudian melihat peluang dapat bertindak curang tanpa diketahui orang lain, dan akan mencari pembenaran terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan. Kemampuan seseorang melakukan kecurangan juga menjadi alasan yang kuat, apabila tidak memiliki kemampuan maka kecurangan tidak mungkin terjadi. Kesombongan atau kurangnya hati nurani adalah sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Penelitian dilakukan untuk menggali persepsi pada pengelolaan keuangan di pemerintah desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan bantuan para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari sekretaris, kasi, dan kaur yang dipilih berdasarkan keputusan kepala desa.

Pengendalian internal yang berjalan dengan baik bisa menghindari adanya tindakan pencurian, penggelapan, ataupun penyimpangan aktiva pada tempat yang kurang tepat. Peraturan pengendalian internal pada sektor pemerintahan diharapkan bisa diterapkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah desa supaya tercapainya tujuan dan tata kelola organisasi yang baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat diartikan sebagai prosedur penyelenggaraan atas pengelolaan kebijakan pemerintah diikuti aktivitas proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Proses penyelenggaraan efektivitas pengendalian internal pada pemerintah tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa SPIP bertujuan untuk pengendalian di unit kerja maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komponen pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Apabila sistem pengendalian internal di pemerintah desa diterapkan dengan baik, *accounting fraud tendency* dapat dikurangi (Udayani & Sari, 2017).

Kompensasi adalah bentuk dari hadiah atau komisi yang akan diterima pegawai atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan kepada organisasi. Menurut Suwatno dan Priansa konsep kompensasi sangat luas tidak hanya dengan gaji atau upah, diantaranya kompensasi langsung misalnya tunjangan, insentif, dan bonus. Kompensasi tidak langsung misalnya fasilitas kantor yang memadai, mobil dinas, adanya asuransi kesehatan. Kompensasi non-finansial misalnya pelatihan pegawai, penghargaan atas prestasi pegawai. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, menjamin hak keadilan dalam perusahaan, dan mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik (Suwatno dan Priansa, 2018).

Pemberian kompensasi pada pegawai pemerintah desa terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian ke delapan yang menyatakan bahwa “Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan kompensasi berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain setiap bulannya”. Kesejahteraan pegawai desa dari pemberian kompensasi oleh negara diharapkan dapat menjadi

timbang balik untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan tugas yang diberikan dan pekerjaan yang dilakukan akan mempengaruhi seseorang merasa puas tidaknya dan terjadinya tindakan kecurangan.

Penyajian laporan keuangan yang menyimpang dari prosedur yang berlaku adalah bentuk suatu kegagalan dalam pelaporan keuangan dan menimbulkan terjadinya perilaku agen serta perilaku tidak etis yang sulit untuk ditelusuri (Thoyibatun, 2012). Pengelolaan keuangan desa sendiri sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan di pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Kegiatan pengelolaan tersebut mengikuti aturan akuntansi desa yang dimulai dari pencatatan transaksi-transaksi yang telah dilakukan berdasarkan bukti nota-nota transaksi sampai dengan tahapan pelaporan keuangan sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Kepala desa dan PPKD diharapkan dapat mematuhi ketentuan dan standar prosedur yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaan tata kelola keuangan serta penyusunan laporan keuangan desa guna mencegah terjadinya *accounting fraud tendency* (Pandita et al., 2020).

Moralitas individu juga bisa menjadi faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *accounting fraud tendency*. Menurut Radhiah moralitas adalah kesadaran mengenai baik buruknya perilaku seseorang yang memungkinkan individu dapat hidup berinteraksi dalam suatu kelompok. Moralitas berhubungan dengan etika dan

sopan santun dimana tidak tetap dan berubah pada titik waktu tertentu. Level penalaran moral setiap individu memiliki perbedaan dalam menghadapi dilema etika. Penalaran moral individu yang lebih luas diharapkan dapat berperilaku yang lebih baik dan sesuai etika serta menghindarkan diri dari tindakan kecurangan (*fraud*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Radhiah, 2016).

Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas Individu Terhadap *Accounting Fraud Tendency* Pada Pengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Sidoarjo).”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditulis rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap *Accounting Fraud Tendency*?
- 1.2.2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *Accounting Fraud Tendency*?
- 1.2.3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *Accounting Fraud Tendency*?
- 1.2.4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap *Accounting Fraud Tendency*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap *Accounting Fraud Tendency* dalam bukti empiris.
- 1.3.2. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *Accounting Fraud Tendency* dalam bukti empiris.
- 1.3.3. Untuk menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *Accounting Fraud Tendency* dalam bukti empiris.
- 1.3.4. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap *Accounting Fraud Tendency* dalam bukti empiris.

### 1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat membagikan tambahan pengetahuan serta dijadikan bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang akuntansi forensik dan akuntansi sektor publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *accounting fraud tendency* pada pemerintah desa.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tentang macam kasus-kasus kecurangan (*fraud*) akuntansi di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana pemahaman

teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan pada keadaan dan situasi yang terjadi di dunia praktik.

- 2) Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai pengendalian internal, kesesuaian pemberian kompensasi, ketaatan dalam menerapkan aturan akuntansi, dan moralitas individu para pegawai pada pemerintah desa. Faktor-faktor tersebut dilakukan untuk mencegah adanya *fraud tendency* kedepannya.
- 3) Bagi akademik, Program Studi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan dari penelitian terbaru mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap *accounting fraud tendency*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. *Fraud Pentagon Theory*

Teori oleh Crowe Howart (2011) mengembangkan *Fraud Pentagon Theory* dari perluasan *fraud triangle theory* oleh Donald Cressey (1953) dan *fraud diamond theory* oleh David T. Wolfe dan D. R. Hermanson (2004). Crowe mengembangkan model *fraud* dengan menambahkan satu elemen fraud lainnya yaitu arogansi sehingga menjadi lima elemen antara lain *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance*. Teori *fraud triangle* dan *fraud diamond* dalam perkembangannya telah banyak membantu analisis dan investigasi tindakan kecurangan (*fraud*) namun di zaman sekarang kecurangan lebih dilengkapi dengan informasi lebih dan akses ke dalam aset dibandingkan dengan era Cressey (Zelin, 2018).

Teori *fraud pentagon* menyebutkan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) adalah akibat dari adanya lima sifat antara lain adanya tekanan, peluang, pembenaran, kemampuan, serta arogansi melakukan kecurangan. Adanya tekanan baik dari diri sendiri maupun orang lain, adanya peluang atau kesempatan karena lemahnya pengawasan, rasionalisasi atau berusaha membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan, kemampuan individu yang mendorong untuk berbuat kecurangan, serta arogansi individu mampu melakukan kecurangan dan pengendalian internal yang ada tidak bisa mempengaruhi dirinya. Teori yang











*agent* (Sutrisna, 2019). *Principal* sebagai pemegang saham membuat kontrak dengan *agent* (manajemen) untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan. Tiga jenis asumsi dalam teori keagenan antara lain 1) Asumsi tentang sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko, 2) Asumsi adanya konflik antar anggota serta perbedaan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang disebut asumsi keorganisasian, serta 3) Asumsi informasi dimana informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Karena ketiga asumsi itu perusahaan melakukan sistem pengendalian yang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen (Udayani & Sari, 2017).

Kita misalkan pemerintah dalam lembaga pemerintah desa sebagai *principal* atau memiliki hak kepemilikan, kemudian pengelola keuangan desa sebagai *agent* yang dipercayakan untuk mengelola aktivitas dan operasional anggaran dana desa. Pihak Pengelola Keuangan Desa sebagai *agent* mengolah sumber daya secara optimal agar dapat membatasi aktivitas pimpinan supaya tetap berada pada kontrak yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Disisi lain pimpinan juga memiliki karakteristik berusaha mengatur tanggung jawabnya dapat mengurangi pembelanjaan biaya dengan meningkatkan kemampuan diri dan memperoleh tambahan manfaat untuk dirinya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat membuat seorang pimpinan berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya asimetri informasi seperti masalah penyajian informasi kepada pihak

selain pimpinan dan perilaku pimpinan yang menyimpang. Kedua pihak (*principal* dan *agent*) dapat memperbaiki masalah tersebut dengan mengatur kembali kontrak mengikuti prosedur kerja dan aturan akuntansi yang telah ditetapkan (Thoyibatun, 2012).

Penulis memproyeksikan teori keagenan dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) karena dipengaruhi asumsi manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri, manusia mempunyai keterbatasan tidak bisa memprediksi masa depan, dan manusia cenderung menghindari adanya risiko. Pengelola keuangan desa bertindak demi kepentingan dirinya sendiri karena pengendalian internal yang lemah bisa mengindikasikan adanya kecurangan (*fraud*). Apabila kompensasi yang diterima pengelola keuangan desa tidak adil dan sesuai, kesejahteraan pegawai tidak terpenuhi pemenuhan kompensasi yang ingin didapatkan memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi lebih besar. Ketaatan aturan akuntansi yang berlaku sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipenuhi, sifat manusia yang cenderung menghindari risiko karena peraturan yang ada memungkinkan adanya salah saji dalam penyampaian laporan keuangan. Moralitas individu juga penting untuk dipertimbangkan sebab kecurangan terjadi karena masing-masing perilaku individu yang berbeda. Sifat mementingkan dirinya sendiri, cenderung menghindari risiko, dan mempunyai keterbatasan tidak mampu memprediksi masa depan.

### 2.1.3. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori akan proses bagaimana seseorang dalam menginterpretasikan kejadian yang dialami karena perilaku yang telah dilakukan. Teori yang dicetuskan Fritz Heider (1958) ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yang ditentukan dengan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain baik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (*internal forces*) berasal dari kendali pribadi individu misalnya kemampuan individual, sifat pribadi, motivasi, dan usaha seseorang meraih keinginannya. Faktor eksternal (*external forces*) berasal dari luar pribadi individu artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi misalnya keadaan lingkungan dari kondisi sosial, nilai, pandangan masyarakat, atau aturan dalam melakukan pekerjaan. Fritz Heider menjelaskan bahwa faktor internal dan faktor eksternal dapat terjadi secara bersamaan dalam menentukan perilaku seseorang (Lubis, 2014).

Penilaian setiap individu terhadap sesuatu hal yang terjadi pasti berbeda-beda, penentuan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan atau keunikan perilaku individu yang ditunjukkan saat menghadapi situasi yang sama. Konsensus yaitu kesamaan perilaku individu dalam merespon jika semua orang menghadapi situasi yang sama. Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku individu dengan cara yang sama dari waktu ke waktu (Lubis, 2014).

Penulis memproyeksikan proses atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) karena dipengaruhi faktor internal yaitu pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu sedangkan faktor eksternalnya adalah kesesuaian kompensasi. Pengendalian internal bagian internal dari teori atribusi karena dengan menilai kualitas dan kebermanfaatan perilaku manusia dari kendali diri masing-masing individu. Kesesuaian kompensasi menjadi bagian eksternal dari teori atribusi karena kompensasi yang diberikan kepada pegawai penting sebagai faktor yang menentukan kesejahteraan dan berpengaruh terhadap perilaku serta kinerjanya. Ketaatan aturan akuntansi menjadi bagian internal dari teori atribusi dikarenakan dari dalam individu untuk mengontrol diri membuat laporan keuangan yang benar berdasarkan standar akuntansi. Penerapan ketaatan aturan akuntansi yang baik di suatu organisasi menunjukkan bahwa keyakinan, nilai, norma, serta kebiasaan yang baik juga kuat. Sebaliknya jika tidak memiliki komitmen yang kuat lebih mudah terjadi perilaku tidak baik dalam organisasi. Moralitas individu menjadi bagian internal dari teori atribusi dikarenakan kualitas dalam menunjukkan sikap baik dan buruknya perilaku seseorang. Level penalaran moral individu yang lebih baik akan turut mendahulukan kepentingan di sekitarnya berdasarkan prinsip-prinsip moral sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*) akuntansi yang merugikan banyak pihak.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya teori atribusi adalah teori yang mendasari penyebab individu melakukan suatu kejadian

dimana dalam penelitian ini adalah praktik kecurangan akuntansi. Penilaian yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap *accounting fraud tendency*.

#### 2.1.4. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses dimana organisasi sektor publik mulai dari tahap perencanaan sampai tersedianya laporan keuangan guna menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan akuntansi sektor publik, karakteristik relevan, handal, dan mudah dipahami harus dimiliki dalam bentuk laporan keuangan. *American Accounting Association* (AAA) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membagikan keterangan sesuai kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya organisasi secara cepat, tepat, efisien, dan ekonomis (kontrol manajemen) serta akuntabilitas yang berarti menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pelaporan pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya hasil operasi dari penggunaan dana publik tersebut (Sari, 2012).

Pelayanan pada sektor publik seperti layanan komunikasi, pendidikan, transportasi, dan lainnya juga dilakukan oleh sektor swasta, perbedaan yang tidak dapat digantikan dari sektor publik adalah pada birokrasi pemerintahan. Lingkungan organisasi sektor publik cukup kompleks dan banyak pergolakan yang meliputi (Mardiasmo, 2018):

- a. Faktor Ekonomi, misalnya permasalahan kesejateraan ekonomi masyarakat, tingkat inflasi suatu negara, arus modal dalam negeri, infrastruktur dan teknologi, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, atau pendapatan per kapita (GDP/GNP).
- b. Faktor Politik, misalnya faktor kelembagaan, hubungan negara dengan masyarakat, elit politik dan massa, ideologi negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, atau tipe rezim yang berkuasa.
- c. Faktor Kultural, misalnya tingkat pendidikan, karakteristik sistem nilai masyarakat, keragaman SARA, budaya dan historis negara.
- d. Faktor Demografi, misalnya permasalahan pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, struktur usia penduduk, dan migrasi.

Dalam menjalankan aktivitas organisasi sektor publik harus memperhatikan konsep *value for money* dimana dalam pengelolaan organisasi sektor publik harus memperhitungkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nilai ekonomi dimana perbandingan *input* yang minimum dan mencapai *output* yang lebih tinggi atau bisa dinyatakan dalam satuan *currency*. Nilai efisiensi berarti target capaian *output* yang maksimum dan *input* yang lebih kecil dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Nilai efektivitas adalah hasil capaian yang telah dilakukan sesuai dengan tingkat program target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Ruang lingkup akuntansi sektor publik ada di dalam yaitu seperti lembaga pemerintahan dan departemen yang mengikuti, pemerintah daerah, partai politik









No.	Nama dan Tahun	Pengukuran Variabel	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil
	2016)	gan kecurangan akuntansi			
9.	Fraud Pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika Organisasi Pemerintah  (Sulastri & Simanjuntak, 2014)	Variabel independen adalah keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, etika organisasi pemerintah. Variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi	Populasi penelitian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sampel penelitian pada Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Analisis data menggunakan <i>software</i> SPSS	Keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> sedangkan Etika organisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>
10.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi”  (Thoyibatun, 2012)	Variabel independen adalah kesesuaian sistem pengendalian internal, sistem kompesasi, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis. Variabel dependen adalah kecenderun	Populasi penelitian di Perguruan Tinggi Negeri se Jawa Timur di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan sampel penelitian sebanyak	Teknik analisis dengan model regresi	Kesesuaian sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, dan ketataan aturan akuntansi berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Kesesuaian sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, ketataan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis



Pengendalian internal organisasi yang kurang efektif mengundang celah atau kesempatan terjadinya kecurangan (*fraud*) (Pandita et al., 2020).

Sistem pengendalian internal adalah sistem atas cara, prosedur, kebijakan, yang telah dijalankan supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Komponen pengendalian internal berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dibagi menjadi antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Terjadinya kecurangan (*fraud*) menjadi salah satu faktor pengendalian internal yang masih lemah, sebaliknya jika pengendalian internal kuat dan berjalan dengan baik kemungkinan terjadinya kecurangan bisa lebih kecil atau berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Azmi (2019) menyatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang diterapkan secara efektif dapat mengurangi *accounting fraud tendency* dan meminimalkan kesempatan bagi individu untuk berkomitmen terhadap kecurangan. Hasil tersebut sama dengan penelitian oleh Eliza (2015) serta Fernandhytia dan Muslichah (2020) yang menyatakan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *accounting fraud tendency*. Apabila sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir, sebaliknya apabila sistem pengendalian internal kurang efektif kemungkinan terjadinya penyimpangan semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency***

2.3.2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Kesesuaian pemberian kompensasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan (*fraud*). Teori *Fraud pentagon* menyatakan bahwa seseorang merasakan adanya tekanan, baik terkait keuangan ataupun dalam pekerjaan membuat motivasi untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Adanya kompensasi memberikan seorang pegawai motivasi terhadap kinerja yang akan dilakukan demi kesejahteraan pegawai. Perasaan ketidaksesuaian antara kompensasi yang diterima dengan hasil kinerja yang telah dilakukan dapat membuat seseorang berperilaku curang. Keadilan dapat dilihat berdasarkan penerimaan kompensasi setiap pegawai, apabila sesuai berdasarkan hasil dan kemampuan yang telah dicurahkan akan memberikan semangat baru sehingga tidak akan melakukan kecurangan. Kompensasi juga digunakan untuk memotivasi kinerja sebab berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Apabila kompensasi sesuai dengan yang diberikan dan kesejahteraan terpenuhi maka *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir (Sulastri & Simanjuntak, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi disebabkan karena kesesuaian kompensasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan pemberian kompensasi yang tepat dan adil pada aparatur desa dapat meminimalkan tindakan kecurangan akuntansi karena kesejahteraan perangkat desa diperhatikan dengan baik. Penelitian oleh Pandita

(2020 menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa. Radhiah (2016) menyatakan kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh terhadap *accounting fraud tendency*. Apabila pemberian kompensasi karyawan tepat dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan menurun, sebaliknya pemberian kompensasi yang sesuai dengan peraturan dan kinerja yang telah dilakukan, maka tingkat adanya tindakan *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency***

### 2.3.3. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Kepatuhan terhadap aturan akuntansi adalah kewajiban akuntan mematuhi ketentuan, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku sebagai pedoman melaksanakan pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabilitas serta membuat laporan keuangan secara efektif, handal, dan akurat informasinya. Ketaatan aturan akuntansi memproksikan elemen pada teori *fraud pentagon* berupa *capability* atau kemampuan. Pengadaan laporan keuangan yang tidak mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan menjadi salah satu bentuk kegagalan laporan keuangan, kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi lebih besar dan auditor akan sulit menemukan. Apabila pemerintah desa menerapkan

aturan akuntansi dengan baik, adanya *accounting fraud tendency* dapat berkurang (Thoyibatun, 2012).

Penelitian ini didukung penelitian oleh Mustikasari (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif penegakan hukum/peraturan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Pandita (2020) menyatakan bahwa kepatuhan aturan akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa. Putri dan Irwandi (2016) menyatakan kepatuhan terhadap aturan akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency*, dimana semakin taat terhadap aturan akuntansi pelaporan keuangan, semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi. Perbuatan *accounting fraud tendency* juga disebabkan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan. Semakin taat manajemen pada aturan akuntansi yang berlaku, maka kemungkinan *accounting fraud tendency* yang terjadi dapat berkurang dalam organisasi. Standar akuntansi pada pemerintahan sudah mempunyai aturan sendiri yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apabila aturan akuntansi dalam mengukur dan menyajikan laporan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa tidak diikuti dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi, hal ini dapat memberikan peluang terjadinya *accounting fraud tendency*. Begitupun sebaliknya, apabila mengikuti standar akuntansi yang berlaku dapat memperkecil celah pegawai dalam melakukan kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

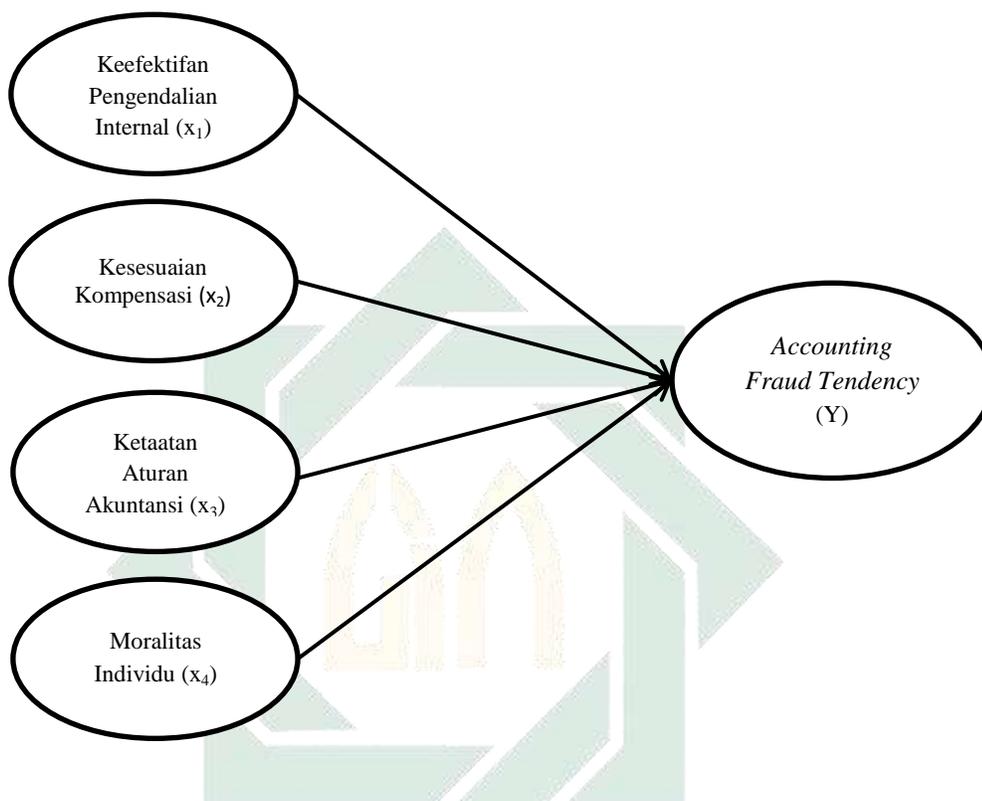
**H<sub>3</sub> : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency***

2.3.4. Pengaruh Moralitas Individu terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Moralitas individu memproksikan elemen dalam teori *fraud pentagon* pada elemen rasionalisasi (*rationalization*) dan arogansi (*arrogance*). *Accounting fraud tendency* juga dipengaruhi dari moralitas individu di dalam organisasi. Semakin tinggi level moral suatu individu (*level post konvensional*), semakin luas individu tersebut memberikan perhatian pada kepentingan dan manfaat untuk orang lain, dibandingkan kepentingan pribadinya. Penelitian oleh Fernandhytia dan Muslichah (2020) menyatakan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency*. Tingkat dari moralitas individu akan memengaruhi keputusan-keputusan dalam melakukan aktivitas kehidupan individu. Tindakan yang membutuhkan pertimbangan moral seperti benar atau salah membuktikan bahwa tingkat level penalaran moral individu yang tinggi dapat memperkecil tingkat *accounting fraud tendency* pada perusahaan, sehingga niat melakukan kecurangan (*fraud*) lebih berkurang.

Penelitian ini juga didukung oleh Eliza (2015), Udayani dan Sari (2017), dan Prawira (2014) yang berpendapat moralitas individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *accounting fraud tendency*. Apabila tingkat penalaran individu semakin tinggi dapat menyebabkan tingkat kecurangan (*fraud*) akuntansi lebih berkurang. Individu dengan level penalaran moral yang tinggi akan menghindarkan diri dari perbuatan kecurangan (*fraud*) dan





**Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual**

Keterangan:

$X_1$  = Pengendalian Intenal

$X_2$  = Kesesuaian Kompensasi

$X_3$  = Ketaatan Aturan Akuntansi

$X_4$  = Moralitas Individu

$Y$  = *Accounting Fraud Tendency*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penerapan dalam pengumpulan data atau informasi kemudian dilakukan analisis data secara teliti dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode penelitian ini bertujuan memperoleh informasi secara signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2018).

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menurut Sugiyono penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme dan bertujuan secara sistematis pada jumlah populasi atau sampel yang telah ditentukan pada penelitian ilmiah. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen-instrumen penelitian yang sudah dibuat dan investigasi data dianalisis dengan teknik model statistika untuk mengembangkan hipotesis dengan berdasarkan fenomena alam (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu dengan variabel dependen yaitu *accounting fraud tendency* berdasarkan fenomena serta data informasi terbaru terjadi saat ini.

### 3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada pengelola keuangan desa di Wilayah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan April 2022 s.d. Juni 2022 selama kurang lebih 3 bulan.

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu pihak pengelola keuangan desa di wilayah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 20 desa.

#### 3.3.2. Sampel

Sampel penelitian merupakan wakil dari populasi penelitian. Sampel penelitian ini adalah diambil dari populasi bagian pengelola keuangan desa di wilayah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Rangkuti, 2017). Pertimbangan yang dilakukan peneliti untuk menentukan sampel penelitian antara lain:

- a. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- c. Kaur Keuangan sebagai penyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
- d. Kaur Tata Usaha & Umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.
- e. Kaur Perencanaan sebagai koordinator urusan perencanaan.

### 3.4. Variabel Penelitian

Variabel merupakan materi yang dapat membedakan dari objek yang diteliti digunakan untuk menguji hipotesis atau kecocokan antara teori yang diberikan dengan fakta empiris yang ada.

Penelitian yang dilakukan memiliki dua macam variabel penelitian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel utama atau variabel yang dipengaruhi dalam investigasi penelitian ini biasanya disimbolkan dengan (Y), sedangkan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen ini disebut variabel independen (X). Variabel dependen penelitian ini adalah *Accounting Fraud Tendency*, sedangkan variabel independen adalah Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas Individu.

### 3.5. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan perincian ciri-ciri variabel agar lebih jelas.

#### 3.5.1. *Accounting Fraud Tendency*

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dipikirkan dan dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak jujur atau ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Kecurangan berbeda dengan kesalahan, kesalahan terjadi karena ketidaksengajaan sedangkan kecurangan adalah tindakan yang disengaja sehingga merugikan pihak lain. *Accounting fraud tendency* atau kecenderungan kecurangan akuntansi adalah

tindakan yang terjadi akibat adanya salah saji pelaporan keuangan dan perlakuan tidak semestinya dalam asset. Dapat berupa penghilangan atau penambahan jumlah secara sengaja maupun pengungkapan laporan keuangan yang tidak semestinya untuk memperdayai pihak pemakai laporan keuangan. Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Pada kuisisioner variabel ini terdapat 10 pertanyaan

### 3.5.2. Pengendalian Internal

*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) (1992) menjelaskan tentang pengendalian Internal adalah suatu alur manajemen yang disebabkan oleh dewan komisaris suatu entitas, pihak manajemen sendiri, serta personel lainnya entitas dengan memberikan kepercayaan tentang keefektivitas dan efisiensi kegiatan operasional entitas, keandalan laporan keuangan entitas mengikuti berdasarkan kesesuaian peraturan dan hukum yang berlaku (Lathifah, 2021). Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Pada kuisisioner variabel ini terdapat 10 pertanyaan, 3 diantaranya terdapat pertanyaan negatif di nomor 4, 6, dan 8, dimana cara perhitungannya dibalik nilai bobotnya.

### 3.5.3. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk prestasi dan penghargaan yang diberikan terhadap hasil yang telah dilakukan oleh tenaga kerja. Pemberian kompensasi merupakan bentuk penghargaan perusahaan untuk karyawannya. Pemberian kompensasi yang diterima seseorang dapat berupa imbalan finansial dan imbalan non finansial. Kompensasi finansial dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, premi, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi non finansial biasanya bersifat jangka panjang dapat berupa kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan, seperti program rekreasi atau fasilitas yang lengkap. Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Pada kuisisioner variabel ini terdapat 10 pertanyaan.

### 3.5.4. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban akuntan memenuhi aturan, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku sebagai pedoman melaksanakan pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabilitas serta membuat laporan keuangan secara efektif, handal, dan akurat informasinya. Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Pada kuisisioner variabel ini terdapat 10 pertanyaan.





berupa grafik distribusi (histogram, polygon frekuensi), ukuran nilai pusat (*mean*, median, modus), dan ukuran disperse (jangkauan simpangan rata-rata, standar deviasi, varian, dll) (Fanani dan Romlah, 2021).

### 3.6.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk mengukur dan memaknai apa yang akan diteliti. Alat ukur yang digunakan harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam besaran nilai terhadap apa yang diukur. Uji kualitas data penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas (Fanani dan Romlah, 2021).

#### a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian atas instrumen yang digunakan untuk melihat validitas masing-masing item kuisisioner. Validitas sebuah kuisisioner yaitu keandalan isi pertanyaan mampu mengukur variabel sesuai dengan indikator yang disusun (Ghozali, 2013). Uji validitas penelitian memakai *Pearson Correlation* dengan menghitung nilai masing-masing pertanyaan untuk diketahui korelasinya. Kriteria pengujian validitas yaitu memperoleh nilai signifikan 5% (0,05) atau dari nilai  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya apabila  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang bertujuan akan tingkat sejauh mana kuisioner dapat dipercaya dan diandalkan apabila diajukan kembali pada responden penelitian yang sama dari waktu ke waktu, sehingga kuisioner tersebut *reliable*. Tingkat reliabilitas instrumen penelitian yang dilihat berdasarkan nilai *cronbach's alpha*. Kriteria pengujian reliabilitas penelitian jika nilai 0,8-1,0 maka reabilitas baik, nilai 0,6-0,799 maka reabilitas diterima, dan nilai kurang dari 0,6 maka reabilitas kurang baik (Fanani dan Romlah, 2021).

#### 3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang bertujuan akan melihat kelayakan model analisis penelitian berbasis *ordinary least square* (OLS). Untuk dapat memakai model regresi berganda sebagai alat analisis penelitian harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Model yang baik, apabila memenuhi estimasi regresi dengan *ordinary least square* (OLS) akan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang berarti parameter estimasi tidak bias (Fanani dan Romlah, 2021). Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak

apabila dimasukkan model regresi. Data yang berdistribusi normal (tidak moncong ke kiri atau ke kanan) dan variannya sama, maka pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik, sebaliknya jika data berdistribusi tidak normal dan variannya tidak sama menggunakan statistik nonparametrik. Model regresi dapat digunakan untuk analisis parameter jika data berdistribusi normal. Uji normalitas penelitian yaitu menggunakan analisis grafik dan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Kriteria pengujian apabila data berdistribusi normal akan memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui situasi antar variabel bebas apakah terjadi adanya korelasi yang signifikan atau tidak. Model analisis regresi yang baik mengharuskan tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas (non multikolinearitas). Pengujian dilakukan melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model analisis regresi. Kriteria pengujian untuk terbebas dari multikolinearitas adalah nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 yang berarti apabila tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan akan menentukan apakah model analisis regresi yang baik terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian tetap maka tidak terjadi



### 3.7.2. Sumber Data

Sumber data penelitian menggunakan data primer berupa pendapat atau persepsi setiap responden yang dipilih pada pengelola keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder berasal dari laporan keuangan desa yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, serta Hasil Monev Pemerintahan Desa.

### 3.8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner penelitian, wawancara pihak aparat desa, dan dokumentasi. Penulis mengantarkan langsung ke alamat responden dan waktu pengisian kuesioner disesuaikan dengan waktu yang dibuat dengan responden. Responden diminta memberikan jawaban pernyataan dalam bentuk skala interval yang terbagi dalam indikator-indikator penelitian.

### 3.8. Pengujian Hipotesis

#### 3.8.1. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis akan melihat hubungan dan pengaruh variabel lebih dari satu variabel independen (Rangkuti, 2017). Analisis ini digunakan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel bebas dalam penelitian terhadap variabel terikat. Variabel penelitian ini dapat disimbolkan dengan yaitu Pengendalian Internal ( $X_1$ ), Kesesuaian Kompensasi ( $X_2$ ), Ketaatan Aturan Akuntansi ( $X_3$ ), dan Moralitas Individu ( $X_4$ ) sebagai





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1. Lokasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Kantor Desa. Pengelola Keuangan Desa (PKD) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan oleh kepala desa yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan bantuan para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari sekretaris, kasi, dan kaur yang dipilih berdasarkan keputusan kepala desa. Sampel penelitian ini adalah Pihak Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, serta kaur perencanaan.

Peneliti menyebarkan sejumlah 100 buah kuesioner. Dari hasil penyebaran keseluruhan kuisisioner jumlah yang kembali adalah 98 buah kuesioner atau 98% sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 buah atau 2%. Kuesioner yang tidak kembali dikarenakan responden penelitian dalam posisi kosong dan belum ada pengganti untuk posisi tersebut. Sebaran sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.











sebesar 36,59 dan standar deviasi sebesar 5,072. Untuk variabel ketaatan aturan akuntansi jawaban minimum responden adalah sebesar 31 dan maksimum 50 dengan rata-rata total jawaban sebesar 41,65 dan standar deviasi sebesar 4,245. Untuk variabel moralitas individu jawaban minimum responden adalah sebesar 29 dan maksimum 49 dengan rata-rata total jawaban sebesar 41,65 dan standar deviasi sebesar 3,730. Untuk variabel *accounting fraud tendency* jawaban minimum responden adalah sebesar 10 dan maksimum 31 dengan rata-rata total jawaban sebesar 16,77 dan standar deviasi sebesar 4,462. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk variabel pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan *accounting fraud tendency* setuju.

#### 4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data

##### a. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas adalah uji atas instrumen yang digunakan untuk melihat keandalan isi pertanyaan mampu sesuai dengan indikator yang disusun. Pengujian dilakukan menghitung nilai masing-masing pertanyaan menggunakan *Pearson Correlation* untuk diketahui korelasinya. Kriteria pengujian validitas yaitu jika memperoleh nilai signifikan dibawah 5% (0,05) dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid, sebaliknya apabila diatas 5% (0,05) maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas variabel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



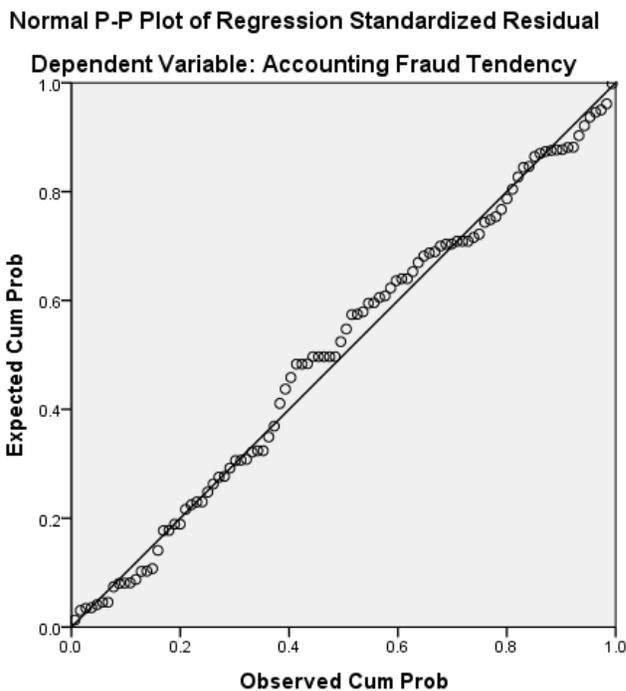








data penelitian berdistribusi normal. Model regresi dalam penelitian dapat diindikasikan telah memenuhi syarat asumsi normalitas.



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot**

Berdasarkan gambar 4.2 di bawah adalah hasil uji normalitas dengan grafik histogram yang menunjukkan bentuk kurva yang seimbang (tidak moncong ke kiri atau ke kanan), dapat dinyatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Model regresi dalam penelitian dapat diindikasikan telah memenuhi syarat asumsi normalitas.















3. Koefisien kesesuaian kompensasi memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,248. Angka ini bisa menyatakan bahwa kenaikan satu persen kesesuaian kompensasi apabila tingkat variabel lainnya tetap, akan menaikkan *accounting fraud tendency* sebesar 0,248. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa Kesesuaian Kompensasi ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Y).
4. Koefisien ketaatan aturan akuntansi memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,305. Angka ini bisa menyatakan bahwa kenaikan satu persen ketaatan aturan akuntansi apabila tingkat variabel lainnya tetap, akan menurunkan *accounting fraud tendency* sebesar 0,305. Karena nilai koefisien regresi bernilai negatif (-), maka dapat dikatakan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Y).
5. Koefisien moralitas individu memiliki nilai koefisien negatif -0,339. Angka ini bisa menyatakan bahwa kenaikan satu persen moralitas individu apabila tingkat variabel lainnya tetap, akan menurunkan *accounting fraud tendency* sebesar 0,339. Karena nilai koefisien regresi bernilai negatif (-), maka dapat dikatakan bahwa Moralitas Individu ( $X_4$ ) berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Y).

d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi adalah uji untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Kriteria pengujian



analisis linear berganda koefisien  $X_1$  diketahui bernilai negatif, dapat diketahui bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*, maka  $H_1$  diterima.

Hasil penelitian ini menemukan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena pengendalian internal yang kurang efektif menimbulkan celah *accounting fraud tendency* lebih besar. Dengan adanya peningkatan pengendalian internal dalam suatu organisasi diharapkan mampu meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*. Konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa Teori Keagenan mempresentasikan semakin tinggi tingkat pengendalian internal pada perusahaan maka akan semakin rendah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut dilandasi dari tiga jenis asumsi antara lain 1) Asumsi tentang sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko, 2) Asumsi adanya konflik antar anggota serta perbedaan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang disebut asumsi keorganisasian, serta 3) Asumsi informasi dimana informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Karena ketiga asumsi itu perusahaan melakukan sistem pengendalian yang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian Pandita (2020) menunjukkan variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa. Kurniawan dan Azmi (2019) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang diterapkan pada lembaga dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi dan meminimalkan kesempatan bagi individu untuk berkomitmen terhadap kecurangan. Eliza (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD. Penelitian oleh Fernandhytia dan Muslichah (2020) dan Radhiah (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif akan mengurangi *accounting fraud tendency*.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Desa dan PDTT yaitu supaya memberikan keyakinan yang memadai dan mendorong para pimpinan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara efektif serta efisien dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dari data sekunder yang diperoleh berupa hasil monev pemerintahan desa dimana dalam pelaksanaan pengendalian internal oleh inspektorat daerah dilaksanakan dua kali pemeriksaan di masing-masing akhir semester satu tahun anggaran. Hasil monev (monitoring dan evaluasi) adalah dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa pada aspek perencanaan sampai tahap pelaporan anggaran desa. Dalam kegiatan evaluasi dan monitoring pemerintah desa di Kecamatan Tarik telah dilakukan pembinaan dan arahan kepada setiap desa untuk segera mencukupi dan melaksanakan kegiatan sesuai APBDes 2021. Adanya sistem pengendalian yang efektif diharapkan kegiatan operasional berjalan dengan

efektif dan kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir.

Teori *pentagon fraud* dalam variabel pengendalian internal diproyeksikan dari aspek-aspek antara lain, aspek tekanan (*pressure*), pelaku melakukan kecurangan bisa disebabkan tekanan dalam pekerjaan maupun kebiasaan pegawai melakukan tindakan kecurangan, maka pengendalian internal dari inspektorat daerah terhadap pengelolaan kegiatan Pemerintahan Desa Kecamatan Tarik sudah dilakukan dan berlangsung pemeriksaan di masa anggaran semester awal 2022. Aspek kesempatan (*opportunity*) yaitu *fraud* bisa terjadi karena pengendalian internal yang masih kurang efektif. Pemerintah desa di Kecamatan Tarik sudah cukup baik dalam hal akses informasi pengelolaan keuangan, jejak audit yang dilakukan berjalan baik walaupun dengan hasil terdapat beberapa catatan dari kualitas kerja pemerintah desa yang belum dilaksanakan dan diselesaikan. Aspek rasionalisasi (*rationalization*) yaitu perasaan yang menjelaskan secara logis untuk menghindari penjelasan yang benar. *Fraud* bisa terjadi jika banyak melakukan pembenaran saat melakukan kecurangan, dilihat dari hasil monev pemerintah desa dalam catatan tiap desa terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan dan diselesaikan, apabila kegiatan itu tidak dilakukan dan pengendalian internal yang masih lemah, maka bisa menimbulkan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Aspek kemampuan (*capability*) melakukan kecurangan karena posisi yang tinggi ataupun pintar dalam mencari akses dari kelemahan pengendalian internal untuk mengambil keuntungan. Sistem pengelolaan keuangan desa sudah

dilakukan dibantu dengan sistem, semua pemasukan dan pengeluaran anggaran akan otomatis terlihat apabila terjadi kejanggalan sedikit saja bisa terdeteksi, sehingga pengendalian yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah harus efektif. Aspek arogansi (*arrogance*) dalam *fraud* terlihat dari sifat keserakahan pegawai pemerintah desa. Dalam kasus pada penelitian ini pelaku kecurangan melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

## 2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*. Hasil analisis linear berganda koefisien  $X_2$  bernilai positif, dapat diketahui bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*, maka  $H_2$  ditolak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian kompensasi yang tepat dan layak diharapkan bisa meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*. Seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) disebabkan adanya tekanan yang didapatkan. Apabila kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan cenderung terjadinya kecurangan lebih besar. Adanya pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) karena biaya kebutuhan semakin tinggi, kondisi ekonomi dari kenaikan harga barang yang tidak menentu. Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) penghasilan yang diberikan oleh negara tidak mampu untuk merasakan tekanan dalam mencukupi pengeluaran yang semakin tinggi tidak sejalan dengan penerimaan yang didapatkan, hal tersebut bisa

menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Pemberian kompensasi pegawai pemerintah desa termuat pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan tunjangan lain setiap bulannya. Dari data sekunder diperoleh Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa uraian kompensasi dapat ditunjukkan pada bagian Belanja dengan rincian masing-masing memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, tunjangan keluarga, tunjangan penambah kebutuhan, uang makan, serta jaminan sosial (ketenagakerjaan) yang dianggarkan dari ADD (Anggaran Dana Desa). ADD yang diperoleh maksimal 30% digunakan untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa. Aturan tersebut harus dipatuhi setiap pemerintah desa serta diharapkan tidak melakukan penyelewengan atau yang menyebabkan kecenderungan kecurangan.

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Sulastri dan Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa variabel keadilan kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* pada sektor pemerintah. Penelitian oleh Putri dan Irwandi (2016), Mustikasari (2013), dan Thoyibatun (2012) yang menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh faktor kesesuaian kompensasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai dan adil pada aparatur desa akan meminimalkan tindakan kecurangan akuntansi karena kesejahteraan perangkat desa diperhatikan dengan baik.

Teori *pentagon fraud* dalam variabel kesesuaian kompensasi diproyeksikan dari aspek-aspek antara lain, aspek tekanan (*pressure*), *fraud* bisa

disebabkan karena tekanan keuangan. Pemberian kompensasi yang diberikan kepada pegawai sudah sesuai dari peraturan untuk penghasilan pegawai pemerintah desa, tetapi menurut para pegawai pemerintah desa penghasilan yang diterima masih kurang untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi dan harga barang-barang semakin mahal, hal tersebut bisa menjadikan tekanan keuangan pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi. Aspek kesempatan (*opportunity*) melakukan *fraud* dari pemberian kompensasi bisa terjadi karena pengendalian internal yang lemah. Penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dan direalisasikan untuk pegawai pemerintah desa dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 sudah sesuai dan diperiksa oleh inspektorat daerah. Aspek rasionalisasi (*rationalization*) pegawai melakukan *fraud* bisa terjadi karena kompensasi yang diterima pegawai pemerintah desa sering terlambat. Aspek kemampuan (*capability*) melakukan kecurangan karena posisi yang tinggi ataupun pintar dalam membuat laporan keuangan yang salah dan tidak sesuai untuk mengambil keuntungan. Aspek arogansi (*arrogance*) dalam *fraud* terlihat dari sifat keserakahan pegawai pemerintah desa. Dalam kasus pada penelitian ini pelaku kecurangan melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena merasa pemberian kompensasi yang diberikan masih kurang.

### 3. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*. Hasil

analisis linear berganda koefisien  $X_3$  bernilai negatif, dapat dikatakan bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*, maka  $H_3$  diterima.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan pengelola keuangan desa dalam mengikuti aturan akuntansi yang berlaku sangat dibutuhkan supaya dapat mengurangi terjadinya *accounting fraud tendency*. Standar akuntansi pada pemerintah desa mengikuti SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dimana penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan aturan akuntansi dalam pemerintah desa sudah termuat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dimana dalam masa satu tahun anggaran wajib diselesaikan dan dilaporkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan asas transparansi, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Sistem keuangan yang digunakan pemerintah desa saat ini sudah menggunakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dikembangkan bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Semua pemerintah desa diwajibkan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Adanya aplikasi SISKEUDES dapat memudahkan dalam kegiatan pengelolaan keuangan serta pengendalian oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Pandita (2020) yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa. Putri dan Irwandi (2016) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan akuntansi sebagai variabel bebas berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency* sebagai variabel terikat, dimana semakin patuh karyawan di aturan akuntansi dalam pelaporan keuangan, semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi. Mustikasari (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif penegakan hukum/peraturan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin taatnya pengelolaan keuangan desa terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka akan semakin menurunkan terjadinya *accounting fraud tendency* yang dilakukan aparatur pengelola keuangan di dalamnya.

Teori *pentagon fraud* dalam variabel ketaatan aturan akuntansi diproyeksikan dari aspek-aspek antara lain, aspek tekanan (*pressure*), pelaku melakukan kecurangan bisa disebabkan tekanan dalam pekerjaan untuk melakukan tindakan kecurangan. Pencatatan akuntansi biasanya dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan apabila pihak tersebut mendapat tekanan yang buruk maka bisa menimbulkan adanya *accounting fraud tendency*. Aspek kesempatan (*opportunity*), pengelolaan keuangan desa dengan pencatatan akuntansi yang sudah dibantu dengan sistem elektronik bernama SISKEUDES, Akses pemerintah desa untuk bisa mengoperasikan hanya bagian sekretaris desa

atau salah seorang pegawai yang mahir dalam IT dan bisa dipercaya menjalankan sistem tersebut, hal tersebut dapat meminimalisir kesempatan melakukan kecurangan. Aspek rasionalisasi (*rationalization*), *fraud* bisa terjadi jika banyak melakukan pembenaran saat melakukan kecurangan, dilihat dari pencatatan akuntansi yang dibantu dengan sistem elektronik SISKEUDES, hal tersebut bisa meminimalisir adanya *accounting fraud tendency*. Aspek kemampuan (*capability*) melakukan kecurangan karena pintar dalam mencari akses maupun pintar dalam memanipulasi laporan keuangan pemerintah desa. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Tarik sudah menggunakan SISKEUDES semua, apabila terjadi kejanggalan yang menimbulkan kecenderungan kecurangan akuntansi bisa segera diketahui, sehingga pengendalian yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah harus efektif. Aspek arogansi (*arrogance*) yaitu sifat keserakahan pegawai pemerintah desa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam kasus pada penelitian ini pelaku kecurangan melakukan korupsi dengan tidak melakukan pencatatan akuntansi keuangan desa.

#### 4. Pengaruh Moralitas Individu terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*. Hasil analisis linear berganda koefisien  $X_4$  bernilai negatif, dapat dikatakan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *accounting fraud tendency*, maka  $H_4$  diterima.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa teori perkembangan moral mengidentifikasi level penalaran moral individu akan memengaruhi cara mereka dalam mengambil sikap. Penalaran moral yang rendah lebih mendahulukan dirinya sendiri berbeda dari level penalaran moral yang tinggi bisa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rasionalisasi atau pembenaran akan terjadinya kecurangan (*fraud*) pada tiap individu sangat dibutuhkan.

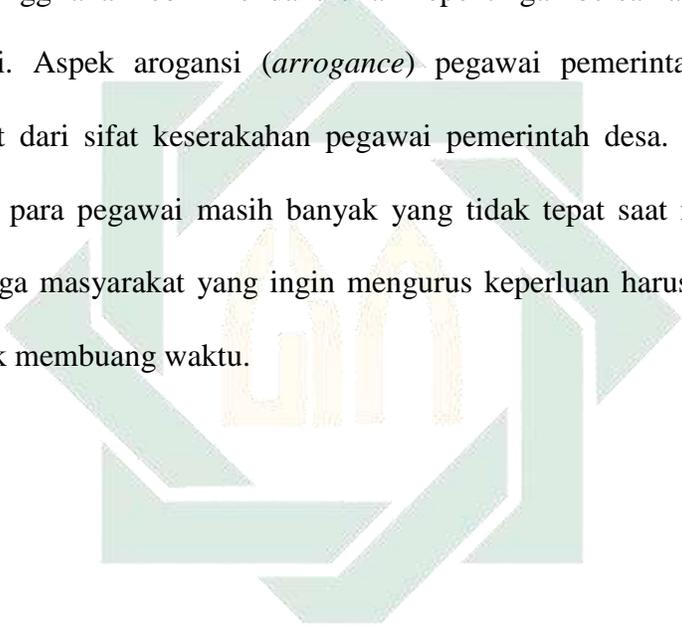
Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Eliza (2015) menyatakan variabel moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD. Semakin baik moralitas individu maka tingkat kecurangan akuntansi semakin berkurang. Udayani dan Sari (2017) dan Prawira (2014) menyatakan variabel moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Fernandhytia dan Muslichah (2020) menyatakan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency*. Tingkat moralitas individu akan memengaruhi keputusan-keputusan dalam melakukan aktivitas kehidupan individu. Tindakan yang membutuhkan pertimbangan moral seperti benar atau salah membuktikan bahwa level penalaran moral individu yang lebih tinggi mampu mengurangi *accounting fraud tendency* pada perusahaan serta memperkecil motivasi karyawan melakukan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan data sekunder diperoleh Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2021 Bab III nilai IKM pelayanan pada

Kecamatan Tarik tidak terdefinisi. Dari hasil monev pemerintahan desa juga terus dilakukan pembinaan dan arahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan untuk memantau progres dari anggaran yang telah disusun masing-masing pegawai dan juga menghindari adanya kecurangan oleh aparat desa.

Teori *pentagon fraud* dalam variabel moralitas individu diproyeksikan dari aspek-aspek antara lain, aspek tekanan (*pressure*), pelaku melakukan kecurangan bisa disebabkan tekanan dalam pekerjaan maupun kebiasaan pegawai melakukan tindakan kecurangan, dilihat dari LKPJ Bupati Sidoarjo 2021 pelayanan pegawai pemerintah desa di Kecamatan Tarik tidak terdefinisi. Dari hasil monev pemerintahan desa inspektorat daerah juga terus melakukan pembinaan dan arahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Aspek kesempatan (*opportunity*), kecurangan bisa disebabkan karena penalaran moral pegawai yang rendah dapat dilihat dari catatan hasil monev pemerintah desa bahwa kualitas kerja pemerintah desa yang masih banyak belum dilakukan dan diselesaikan, apabila kegiatan itu tidak dilakukan maka bisa menimbulkan kesempatan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Aspek rasionalisasi (*rationalization*) yaitu perasaan yang menjelaskan secara logis untuk menghindari penjelasan yang benar. *Fraud* bisa terjadi jika banyak melakukan pembenaran saat melakukan kecurangan, dilihat dari hasil monev pemerintah desa dalam catatan tiap desa terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan dan diselesaikan, apabila rasionalisasi kegiatan itu tidak dilakukan karena penalaran

moral masih rendah adanya kecenderungan kecurangan akuntansi bisa lebih besar. Aspek kemampuan (*capability*) moralitas individu pegawai pemerintah desa melakukan tindakan kecurangan berarti masih lemah. Kemampuan penalaran yang tinggi akan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Aspek arogansi (*arrogance*) pegawai pemerintah desa dalam *fraud* terlihat dari sifat keserakahan pegawai pemerintah desa. Dalam hal pelayanan publik para pegawai masih banyak yang tidak tepat saat masuk di kantor desa sehingga masyarakat yang ingin mengurus keperluan harus menunggu dan akan banyak membuang waktu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency* sehingga H<sub>1</sub> diterima.
2. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency* sehingga H<sub>2</sub> tidak diterima.
3. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency* sehingga H<sub>3</sub> diterima.
4. Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency* sehingga H<sub>4</sub> diterima.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditulis saran untuk masukan dan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pertanggungjawaban, pengawasan, dan tindakan yang akan dilakukan. Selain itu juga mempertimbangkan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi pegawai, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu tiap pegawai agar tindakan kecurangan dapat diminimalisir.

2. Bagi penelitian selanjutnya dinantikan mampu memperluas wilayah cakupan sampel. Sampel penelitian ini adalah pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintahan desa yang ada di Indonesia. Dengan memperluas wilayah cakupan sampel akan diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3. Bagi penelitian selanjutnya dinantikan bisa memenuhi penelitian tentang *accounting fraud tendency* dengan menentukan variabel-variabel lain yang memengaruhi seperti efektivitas fungsi auditor internal, sistem informasi akuntansi untuk pencegahan *fraud*, serta dari segi keperilakuan seperti pengakuan atas kinerja, *loqus of control*, dan *total quality management*. Penelitian ini menghubungkan faktor-faktor *accounting fraud tendency* berdasarkan *fraud diamond theory* bisa juga dengan menggunakan *fraud triangle theory* ataupun *fraud pentagon theory*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





- Kasus Pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1279–1293.
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Medan). *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(September), 25–54.
- Satria, Yulius Wijaya. 2021. *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>. (Diakses pada 17 Desember 2021 pukul 12:40).
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastrri, & Simanjuntak, B. H. (2014). Fraud Pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4938>
- Sutrisna, Anna, et all. 2019. *Akuntansi Keperilakuan Manajerial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwatno Dan Priansa. 2013. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, M. 2021. *Mantan Kepala Desa di Sidoarjo Dijebloskan ke Bui, Diduga Terlibat Kasus Korupsi Dana APBDes*. <https://jatim.tribunnews.com/2021/10/02/mantan-kepala-desa-di-sidoarjo-dijebloskan-ke-bui-diduga-terlibat-kasus-korupsi-dana-apbdes>. (Diakses pada 23 Desember 2021 pukul 10.00).
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja

- Organisasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(2), 245.  
<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2012.V16.I2.2324>
- Tuanakotta, Theodorus M. 2018. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774–1799.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Vamela, D., & Setiyawati, H. (2021). Analysis The Effectiveness Internal Control System And Management Morality On Tendency Of Fraud In Accounting. *MICOSS*.  
<https://doi.org/10.4108/Eai.28-9-2020.2307366>
- Wahyuni, Rista. 2016. *Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Zelin, Cintia. 2018. Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Score Model. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Zimbelman, Mark F., et al. 2014. *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.